

REKAP 1: K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2024

- 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA** : KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- 2. VISI** : Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong
- 3. MISI** :
1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pematapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyalarsan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas

4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL	ALOKASI 2024 (RIBU)
01	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	3.400.000,0
02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	160.347.842,0
03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	24.416.190,0
04	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5.550.000,0
05	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	13.874.090,0
06	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	1.020.477,0
07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	149.092.609,0
Total		357.701.208,0

5. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (RIBU)
01	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia		138.276.418,0
01.01	Indeks Demokrasi Indonesia	78,66	
01.02	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada dan Pemilu	79,5% (Target dalam Pemilu sesuai RPJMN 2020-2024)	
01.03	Indeks Kinerja Ormas	70,0	
02	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah		12.076.772,0
02.01	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	2,40	
02.02	Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)	67,5	
02.03	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi	2,885	
02.04	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	2,330	
03	Meningkatnya kewaspadaan nasional		7.000.000,0
03.01	Indeks Kewaspadaan Nasional	64,0	
04	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas		20.316.586,0
04.01	Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik"	150,0	
04.02	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas	60,0	
05	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri		664.726.212,0
05.01	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun	80,0	
05.02	Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3 (100%)	
05.03	Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional	Level 3 (100%)	
05.05	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni	3,60	
06	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah		4.115.872,0
06.01	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah	Nilai 85 (Sangat Tinggi)	
07	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif		231.617.061,0
07.01	Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai 85 (Sangat Tinggi)	

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (RIBU)
07.02	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai 3,2 (Sangat Tinggi)	
07.03	Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM	100,0	
07.04	Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai 80 (Sangat Sinkron)	
07.05	Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"	75,0	
07.06	Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	37,0	
07.07	Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	36,0	
07.08	Persentase daerah yang memperoleh fasilitasi, pembinaan dan asistensi pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan pemerintah	43	
07.09	Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	100,0	
07.10	Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	Nilai 90 (A)	
08	Terjaminnya hak-hak keberadaan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan		723.537.044,0
08.01	Peningkatan cakupan serta layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	100% Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	
08.02	Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif)	3.123 Lembaga Pengguna	
09	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan		97.364.147,0
09.01	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	60,0	
10	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri		1.410.889.937,0
10.01	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai 93,01	
11	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas		7.084.511,0
11.01	Indeks pengawasan Internal	100	
11.02	Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	85,0	
12	Meningkatnya kemanfaatan hasil rekomendasi strategi kebijakan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri		3.800.000,0
12.01	Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri	65%	
Total			3.320.804.560,0

6. PROGRAM DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2024											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2025	2026	2027
010 CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	308.489.602,0	37.013.031,0	0,0	50.834.432,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	396.337.065,0	452.393.168,0	502.725.042,5	561.663.034,8
010 CP	Program Tata Kelola Kependudukan	690.283.486,0	0,0	0,0	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	691.283.486,0	748.034.399,0	773.407.789,0	799.589.554,0
010 CR	Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	157.353.190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157.353.190,0	449.424.254,0	449.764.254,0	448.179.254,0
010 WA	Program Dukungan Manajemen	2.064.490.673,0	11.340.146,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.075.830.819,0	2.368.334.053,0	2.502.804.462,0	2.429.175.350,0
Total		3.220.616.951,0	48.353.177,0	0,0	51.834.432,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.320.804.560,0	4.018.189.874,0	4.228.701.547,5	4.238.607.192,8

Jakarta, 8 Agustus 2023
Menteri Dalam Negeri

Muhammad Tito Karnavian